

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2004

NOMOR : 8

SERI : B

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR  
3 TAHUN 2000, TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Retribusi Penyedotan Kakus telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2000;
- b. bahwa Ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2000, perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2000, tentang Retribusi Penyedotan Kakus;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002 jo Nomor 22 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Penguatan Kewenangan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2000, tentang Retribusi Penyedotan Kakus yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep/DPRD-10/2000 tanggal 22 Pebruari 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2000 seri B, tanggal 22 Pebruari 2000, diubah sebagai berikut :

A. BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN, Pasal 14 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 14

(1) Pengguna jasa penyedotan kakus sebagai wajib retribusi wajib melakukan pembayaran retribusi yang terutang secara sekaligus atau lunas.

B. BAB XIV KETENTUAN PIDANA, Pasal 16, diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 16

(1) Wajib retribusi yang melanggar Ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1) dan (2), dan Pasal 14 ayat (1) serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
  - (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Ciamis.
- C. Diantara BAB XV dan BAB XVI, disisipkan BAB XVA sebagai berikut :

## BAB XVA PENGAWASAN

### Pasal 17A

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Dinas/Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas/ Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

### Pasal 17B

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat.
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

### Pasal 17C

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan.

- c. Peneanaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis  
pada tanggal 9 Maret 2004.

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 12 Maret 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / Ttd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2004 NOMOR 8 SERI B

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 8 TAHUN 2004  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI  
PENYEDOTAN KAKUS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan mengenai Retribusi Penyedotan Kakus telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2000.

Sehubungan hal tersebut di atas, berkenaan dengan beberapa ketentuan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2000, perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17A  
Cukup jelas

Pasal 17B  
Cukup jelas

Pasal 17C  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas